



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Pahlawan No. 16 Telp. (024) 8311713 Fax. (024) 8311711 Semarang
Website : disnakertrans.jatengprov.go.id; www.bursakerja-jateng.com
email : disnakertrans@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH WACHJU ALAMSYAH, SH

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Norma Kerja

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOH WACHJU ALAMSYAH, SH

Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**

**KETUA KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN NORMA KERJA**

MOH WACHJU ALAMSYAH, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19680505 199703 1 007

MOH WACHJU ALAMSYAH, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19680505 199703 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

Unit Kerja : Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Norma Kerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	1.190 perusahaan

Sub Kegiatan

Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan

Anggaran

Rp. 1.541.000.000,-

Keterangan

APBD

Semarang, Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN



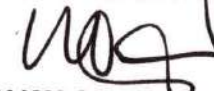
MOH WACHJU ALAMSYAH, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19680505 199703 1 007

Pihak Pertama,

KETUA KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN NORMA KERJA



MOH WACHJU ALAMSYAH, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19680505 199703 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SETYO PAMUNGKAS, S.H., M.H**

Jabatan : Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pati selanjutnya disebut Pihak Pertama; dan,

Nama : **AHMAD AZIZ, S.E., M.Si.**

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Tengah



AHMAD AZIZ, S.E., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680617 199803 1 007

Pihak Pertama,

Kepala Satuan Pengawasan
Ketenagakerjaan Wilayah Pati

SETYO PAMUNGKAS, S.H., M.H

Perata

NIP. 19841209 201001 1 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pati

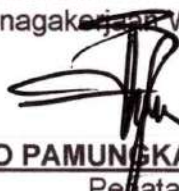
NO. (1)	TUJUAN / SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)	KEUANGAN (Rp) (5)
Tujuan				
1.	Penurunan Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan	Prosentase Perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan	100%	
Sasaran :				
1.1	Perusahaan menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan	a. Penanganan kasus ketenagakerjaan	-	34.070.000
		b. Pengawasan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan:	33 perusahaan	59.160.000
		1. Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	66 Perusahaan	35.970.000
		2. Jumlah Perusahaan/Obyek Keselamatan dan Kesehatan Kerja	42 Perusahaan/ obyek K3	19.740.000
		c. Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) - Administrasi Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	190 perusahaan	122.400.000
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Prosentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	
2.1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	a. Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.600.000
		b. Tersusunnya dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 dokumen	16.780.000
		c. Tersedianya dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	69.825.000

Semarang, Januari 2024

Kepala Dinas
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Tengah



Kepala Satuan Pengawasan
Ketenagakerjaan Wilayah Pati


SETYO PAMUNGKAS, S.H., M.H
Pelata
NIP. 19841209 201001 1 019



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SATUAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
WILAYAH SURAKARTA

Jl. Slamet Riyadi No. 1 Surakarta, Telp. 0271-662113 Fax.0271-661870
Kode Pos 57115 Email: satkerwas.ska.jateng@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL MUIN, ST, MT

Jabatan : Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Surakarta
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : AHMAD AZIZ, SE, MSi

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

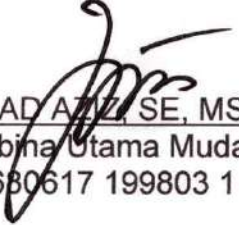
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

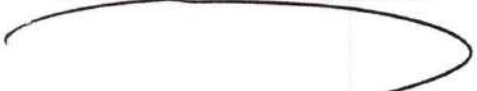
Surakarta,

2025

Pihak Kedua
Kadisnakertrans Prov. Jawa Tengah


AHMAD AZIZ, SE, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19680617 199803 1 007

Pihak Pertama
Kasatwasker Wil. Surakarta


ABDUL MUIN, ST, MT
Pembina
NIP. 19740425 200501 1 004

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

SATUAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH SURAKARTA

NO	SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (VOL)	Anggaran
1	2	3	4	
1	Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan (wasbin).	Terlaksananya pemeriksaan di 326 perusahaan oleh Pengawas KK di Satwasker Surakarta		222.530.000,-
	Belanja Langsung			
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Tersedianya :		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah (@Rp.370.000,-)	430 OH	159.100.000,-
	Transportasi Dalam Daerah	Transportasi Dalam Daerah	1 Tahun	61.350.000,-
	Fotocopy		4.000 lembar	1.000.000,-
	Cetak buku laporan		1 buku	30.000,-
	Alat tulis kantor			1.030.000,-
2	Kegiatan Pemeriksaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja & Kegiatan Riksa Uji Obyek Keselamatan dan Kesehatan Kerja			96.600.000,-
	Belanja Langsung			
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Tersedianya :		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Uang Harian Pemeriksaan Norma K3 = 38 OH x 3 Keg	114 OH	42.180.000,-
		Pemeriksaan & Pengujian Obyek K3 = 33 OH x 2 Keg	66 OH	24.420.000,-
	Transportasi Dalam Daerah	Transportasi Pemeriksaan Norma K3 = 38 OH x 3 Keg	1 Tahun	19.950.000,-
		Pemeriksaan dan Pengujian Obyek K3 = 33 OH x 2 keg	1 tahun	6.600.000,-
	Fotocopy		7.000 lembar	2.100.000,-
	Cetak buku laporan		1 buku	500.000,-
	Alat tulis kantor			850.000,-

3	Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha	Layanan Administrasi dan umum sesuai standar	Poin 85,2 %	74.025.000
	1) Penyediaan alat rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	1 Tahun	10.000.000,-
	2) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya ATK (cetak blangko kopsurat dan copy 10.000 lembar)	1 Tahun	5.545.000,-
	3) Penyelenggaraan Rapat, Kordinasi & Konsultasi	Terselenggaranya rapat, kordinasi dan konsultasi (90 orang/kali)	1 Tahun	36.230.000,-
	4) Penyediaan komponen Instalasi Listrik	Tersedianya komponen instalasi listrik	1 Tahun	3.500.00,-
	5) Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	10.000.000,-
	6) Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersediannya fasilitas kunjungan tamu (90 tamu)	1 tahun	8.750.000,-



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BERNANDA DANIAR, S.IP, M.Si

Jabatan : Analis Bahan Penyelenggaraan Program Pemagangan selaku Ketua Kelompok Kerja Standarisasi dan Sertifikasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MASDUQI, SE,M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Pelatihan Dan Produktivitas

MASDUQI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680421 199503 1 005

Pihak Pertama,
Ketua Kelompok Standarisasi dan
Sertifikasi

BERNANDA DANIAR, S.IP, M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19900321 201010 2 001

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025
SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi Pencari kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (APBD)	1. Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi yang tersertifikasi	125 Orang
2	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (APBD)	1. Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	30 LPK


Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyelenggaraan Uji Kompetensi	273.125.000,-	APBD
Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	176.875.000,-	APBD

Kepala Bidang
Pelatihan Dan Produktivitas



MASDUQI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680421 199503 1 005

Ketua Kelompok Kerja
Standarisasi dan Sertifikasi



BERNANDA DANIHAR, S.IP, M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19900321 201010 2 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Pahlawan Nomor : 16 Telp. (024) 8311713 Faksimile (024) 8311711 Semarang
website : <http://disnakertrans.jatengprov.go.id>
e mail : disnakertrans@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Maryoso, SH, MAP

Jabatan : Ketua Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Mumpuniati, SH, MM

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengahseperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA BIDANG
HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMSOS

MUMPUNIATI, SH, MM
Pembina Tingkat I / IV-b
NIP. 19710520 199403 2 010

Pihak Pertama,
Ketua Pokja
Kelembagaan Hubungan Industrial

DWI MARYOSO, SH, MAP
Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19740727 200903 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KELOMPOK KERJA KELEMBAGAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

NO	SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Rakor Mediator Hubungan Industrial	Mediator HI yang mengikuti Rakor	80 orang/ 4 angkatan
2	Pembinaan Pembentukan LKS Tripartit	Terbentuknya LKS Bipartit di	150 orang/ 5 angkatan
3	Peningkatan Kualitas Sarana HI	Meningkatnya kualitas sarana HI	120 orang/ 4 angkatan
4	Koordinasi dan Konsolidasi HI	Terjalannya Koordinasi dan Konsolidasi HI	35 kabupaten/ kota
5	Verifikasi Keanggotaan SP/ SB	Tersedianya data verifikasi SP/SB	1000 unit kerja
6	Pemberdayaan LKS Tripartit	Terselenggaranya sidang pleno dan rapat BP LKS Tripartit	- Rapat BP 7 kali - Sidang Pleno 5 kali
7	Rakor LKS Tripartit	Meningkatnya Kapasitas LKS Tripartit Provinsi dan Kabupaten/ Kota	80 orang/ 1 kali

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Rakor Mediator Hubungan Industrial	Rp. 36.810.000	APBD
2	Pembinaan Pembentukan LKS Tripartit	Rp. 77.555.000	APBD
3	Peningkatan Kualitas Sarana HI	Rp. 56.342.000	APBD
4	Koordinasi dan Konsolidasi HI	Rp. 71.290.000	APBD
5	Verifikasi Keanggotaan SP/ SB	Rp. 1.625.000	APBD
6	Pemberdayaan LKS Tripartit	Rp. 234.475.000	APBD
7	Rakor LKS Tripartit	Rp. 18.318.000	APBD

Plt. Kepala Bidang
Hubungan Industrial Dan Jamsos



MUMPUNIATI, SH, MM
Pembina Tingkat I / IV-b
NIP. 19710520 199403 2 010

Semarang, Januari 2025

Ketua Kelompok Kerja KHI



DWI MARYOSO, SH, MAP
Penata
NIP. 19740727 200903 1 005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Pahlawan Nomor : 16 Telp. (024) 8311713 Faksimile (024) 8311711 Semarang
website : <http://disnakertrans.jatengprov.go.id>
e mail : disnakertrans@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fahmi Arief Nasrullah, SH

Jabatan : Ketua Pokja Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Mumpuniati, SH, MM

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengahseperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA BIDANG
HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMSOS

MUMPUNIATI, SH, MM
Pembina Tingkat I / IV-b
NIP. 19710520 199403 2 010

Pihak Pertama,
Ketua Pokja
Pengupahan dan Kesejahteraan
Tenaga Kerja

FAHMI ARIEF NASRULLAH, SH
Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19801029 200903 1 004

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Pencegahan dan Penyelesaian PHI, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah peserta yang dilakukan pembinaan pengupahan skala provinsi	50 Orang
2.	Penetapan UMP, UMSP, UMK, dan UMSK	a. Jumlah dokumen penetapan UMP	1 Dokumen
		b. Jumlah dokumen penetapan UMK	1 Dokumen
		c. Jumlah peserta Diseminasi Peningkatan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100 Orang

Kegiatan :		Anggaran	Keterangan
1.	Pencegahan dan Penyelesaian PHI, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 272.183.000,-	APBD
2.	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Rp 456.240.000,-	APBD

Pihak kedua
Plt. Kepala Bidang
Hubungan Industrial dan Jamsos



MUMPUNIATI, SH, MM
Pembina Tingkat I / IV-b
NIP. 19710520 199403 2 010

Semarang, 2 Januari 2025
Pihak pertama
Ketua Pokja
Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja



FAHMI ARIEF NASRULLAH, SH
Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19801029 200903 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NASHRUDDIN ANWAR, ST, MT**

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOH WACHJU ALAMSYAH, SH**

Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

KETUA KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN NORMA K3

MOH WACHJU ALAMSYAH, S.H.

NASHRUDDIN, ANWAR, ST MT

Pembina Tingkat I

Penata Tingkat I

19680505 199703 1 007

NIP. 19790505 201101 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

Unit Kerja: Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

NO (1)	SASARAN SUB KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah perusahaan/obyek K3 yang dilakukan pemeriksaan dan pengujian obyek K3	269 perusahaan/Obyek K3
		Jumlah perusahaan yang dilakukan pembinaan dan pemeriksaan norma K3	312 Perusahaan
		Jumlah perusahaan yang belum membentuk atau sudah membentuk tetapi belum melaksanakan program dan kegiatan P2K3 secara optimal	50 Perusahaan

Nama Sub Kegiatan:
Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan

Anggaran:
Rp 723.000.000,-

Keterangan:
APBD

Semarang, Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

MOH WACHJUALAMSYAH, SH

Pembina Tk. I
NIP. 19680505 199703 1 007

Pihak Pertama
KETUA KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN NORMA K3

NASHRUDDIN ANWAR, ST, MT

Penata Tingkat I
NIP. 19790505 201101 1 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Pahlawan Nomor : 16 Telp. (024) 8311713 Faksimile (024) 8311711 Semarang
website : <http://disnakertrans.jatengprov.go.id>
e mail : disnakertrans@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novian Heru R, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Syarat Kerja dan Jaminan Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUMPUNIATI, S.H.,M.M.

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

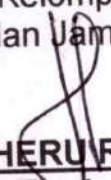
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Bidang
Hubungan Industrial dan Jamsos


MUMPUNIATI, S.H.,M.M.
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP. 19710520 199403 2 010

Pihak Pertama,
Ketua Kelompok Kerja
Syarat Kerja dan Jaminan Sosial


NOVIAN HERU R, S.H., M.H.
Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19821120 201101 1 007

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	a. Jumlah pengusaha atau pemberi kerja yang mengikuti bimbingan pembuatan PP (Peraturan Perusahaan) / PKB (Perjanjian Kerja Bersama)	105 Orang
		b. Jumlah petugas data HI dan Jamsos yang memahami pengolahan data HI dan Jamsos	70 Orang
		c. Jumlah Perusahaan yang teridentifikasi belum memenuhi ketentuan PP/PKB	105 Orang
		d. Jumlah tenaga kerja yang mengikuti sosialisasi kepesertaan BPJS/jaminan sosial	140 Orang

Kegiatan :

	Anggaran	Keterangan
1 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp 349.824.000,00	APBD
a. Jumlah pengusaha atau pemberi kerja yang mengikuti bimbingan pembuatan PP (Peraturan Perusahaan) / PKB (Perjanjian Kerja Bersama)	Rp 125.380.000,00	APBD
b. Jumlah petugas data HI dan Jamsos yang memahami pengolahan data HI dan Jamsos	Rp 107.652.000,00	APBD
c. Jumlah Perusahaan yang teridentifikasi belum memenuhi ketentuan PP/PKB	Rp 28.881.000,00	APBD
d. Jumlah tenaga kerja yang mengikuti sosialisasi kepesertaan BPJS/jaminan sosial	Rp 87.911.000,00	APBD

Semarang, Januari 2025

Pihak kedua
Plt. Kepala Bidang
Hubungan Industrial dan Jamsos

Pihak Pertama,
Ketua Kelompok Kerja
Syarat Kerja dan Jaminan Sosial


MUMPUNIATI, S.H.,M.M.
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP. 19710520 199403 2 010


NOVIAN HERUR, S.H.,M.H.
Penata Tingkat I/ (III/d)
NIP. 19821120 201101 1 007



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Pahlawan No. 16 Telp. (024) 8311713 Fax. (024) 8311713 Semarang 50241

Website : www.disnakertrans.jatengprov.go.id

Email : disnakertrans@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARY LUSIAWATY, SE,M.Si

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Pelatihan dan Pemagangan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MASDUQI, SE,M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Pelatihan Dan Produktivitas

MASDUQI, SE,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680421 199503 1 005

Pihak Pertama,
Ketua Kelompok Kerja
Pelatihan dan Pemagangan

ARY LUSIAWATY, SE,M.Si

Pembina

NIP. 19740812 199803 2 008

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025
SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi Pencari kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1. Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	50 orang
2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	2. Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas	3 unit

Program
Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Anggaran (Rp.)
350.000.000,-

Keterangan
APBD

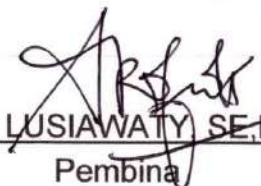
Semarang, Januari 2025

Kepala Bidang
Pelatihan Dan Produktivitas



MASDUQI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680421 199503 1 005

Ketua Kelompok Kerja
Pelatihan dan Pemagangan



ARY LUSIAWATY, SE, M.Si
Pembina
NIP. 19740812 199803 2 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. DWI ARI ASTUTI, MM

Jabatan : Instruktur Madya sebagai Ketua Kelompok Kerja Produktivitas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MASDUQI, SE,M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melanjutkan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas


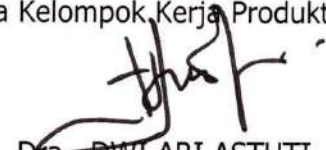
MASDUQI, SE, MSi
NIP. 19680421 199503 1 005

Pihak Kedua

Ketua Kelompok Kerja Produktivitas

Dra. DWI ARI ASTUTI, MM
NIP. 19680116 199203 2 008

**PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025
KELOMPOK KERJA PRODUKTIVITAS**

NO.	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya jumlah perusahaan, lembaga pemerintah, swasta, pendidikan serta masyarakat dalam peningkatan produktivitas		
	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
2	Konsultasi Produktivitas pada perusahaan menengah	Prosentase perusahaan, lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan serta masyarakat yang menjadi jejaring produktivitas	4,60 %
	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	
3.	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	a. Jumlah Kab/Kota yang Dimonitoring Evaluasi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Lattas	35 Kab/Kota
		b. Jumlah Lembaga pemerintah, swasta dan Pendidikan mengikuti bimbingan teknis peningkatan produktivitas Kegiatan : Forum Sinergitas Produktivitas	90 Orang
		c. Jumlah peserta yang mengikuti Penyebaran informasi produktivitas baik kepada pemerintah, komunitas desa potensial, pelaku usaha melalui konvensi, festival produktivitas dan penghargaan produktivitas. Kegiatan : Unit Peningkatan Produktivitas Perusahaan (UP3)	40 orang / 22 perusahaan
		d. Jumlah peserta yang mengikuti Penyebaran informasi produktivitas melalui pendampingan ke perusahaan pemenang sidhakarya menuju paramakarya	7 perusahaan
		d. Jumlah tenaga kerja yang menerapkan peningkatan produktivitas desa Kegiatan : Peningkatan Produktivitas di Desa DBHCT	330 orang
Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Perusahaan Menengah		Anggaran (Rp) 200.000.000 750.000.000	Keterangan APBD DBHCT
Kepala Bidang Pelatihan Dan Produktivitas  <u>MASDUQI, SE, M.Si</u> NIP. 19680421 199503 1 005			Semarang, Januari 2025 Ketua Kelompok Kerja Produktivitas  <u>Dra. DWI ARI ASTUTI</u> NIP. 19680116 199203 2 008



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Pahlawan No.16 Telp (024) 8311713 Fax (024) 8311711

SEMARANG – Kode Pos : 50241

Website : www.dsnakertrans.jatengprov.go.id

www.bursakerja.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulistiyo Ardi Nugroho, S.AP, M.Si
Jabatan : Pengantar Kerja Ahli Muda / Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Candra Yuliawan, Ap, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
PENEMPATAN DAN TRANSMIGRASI


CANDRA YULIAWAN, AP, M.SI
Pembina Tingkat I
NIP. 19750728 199311 1 001

Pihak Pertama
Pengantar Kerja Ahli Muda


SULISTIYO ARDI NUGROHO, S.AP, M.SI
Penata Tingkat I
NIP.19860301 201001 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KELOMPOK KERJA PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI


NO	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1.	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja Tersedia dan/atau ditingkatkan Kompetensinya	70 Orang
2.	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Masyarakat Memperoleh Informasi Peluang, Mekanisme dan Prosedur Kerja Jumlah Perusahaan Dilakukan Job Cavasing/Monitoring Penempatan Tenaga Kerja Jumlah Calon Tenaga Kerja AKAD Mengikuti OPP AKAD	1.150 Orang 10 Perusahaan 70 Orang
3.	Penyuluhan Bimbingan Jabatan	Jumlah Pencari Kerja / Calon Pencari Kerja Yang Mendapatkan PBJ	100 orang
4.	Pembinaan Operasional Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Stakeholder Yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL (Bursa Kerja Khusus)	50 Orang
5.	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS Yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian	4 LPTKS
6.	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi Yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online dan Laporan Informasi Pasar Kerja	1 Set Data
7.	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja/Job Fair	100 Orang

Program Penempatan Tenaga Kerja	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Kabupaten/Kota	Rp. 840.191.000,-	APBD
2. Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.000.000,-	APBD
3. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp. 516.500.000,-	APBD
Jumlah	Rp. 1.366.691.000	APBD

Pihak Kedua
 KEPALA BIDANG
 PENEMPATAN DAN TRANSMIGRASI

 CANDRA YULIANAWAN, AP, M.SI
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19750728 199311 1 001

Semarang, Januari 2025

Pihak Pertama
 Pengantar Kerja Ahli Muda

 SULISTIYO ARDI NUGROHO, S.AP, M.SI
 Penata Tingkat I
 NIP.19860301 201001 1 014